



IMPLEMENTASI DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG UNTUK MASYARAKAT MISKIN PADA KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

Latifah

Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: latifahmusthafa@gmail.com

Article History:

Received: 18-04-2024

Revised :15-05-2024

Accepted:21-05-2024

Keywords:

Implementasi, lpg 3 kg,
Masyarakat Miskin

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin masih kurang maksimal sulitnya mengendalikan masalah yang dihadapi, karena keragaman pengetahuan yang dimiliki, dan jumlah masyarakat miskin tiap desa berbeda-beda. Kurangnya kemampuan dalam kebijakan untuk mensistematisasikan proses dalam implementasinya seperti tidak adanya data siapa nama yang berhak menerima gas lpg 3 kg, proses pendistribusian yang tidak menentu ke sub agen. Pengaruh langsung variabel kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan seperti sub agen lebih memilih menjual gas lpg 3 kg ke keluarganya, atau ke pengecer untuk mendapatkan untung lebih banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, kesadaran masyarakat. faktor yang mendukung adalah sumber daya manusia yang memadai, dan Koordinasi. Implikasi pada penelitian ini adalah gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin dapat di implementasikan dengan baik. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia, melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan, memberikan peringatan yang tegas saat ada pelanggaran..

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram dalam rangka

untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara. Adapun untuk pendistribusian LPG agar bisa sampai ke masyarakat harus melalui penyalur atau agen LPG 3 kg yang kemudian diteruskan kepada sub agen hingga akhirnya sampai ke masyarakat. Berdasarkan pada surat edaran yang diMuara Haruskan Gubernur Kalsel nomor 541/0030/EKO tentang penggunaan tabung gas LPG 3 kg. dalam peraturan tersebut Gubernur Kalimantan Selatan menghimbau kepada PNS Kalimantan Selatan, pelaku usaha mikro yang memiliki jumlah kekayaan bersih lebih Rp.50.000.000,- dan memiliki keuntungan hasil penjualan lebih dari Rp.300.000.000,- serta seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan lebih Rp.1.500.000,- untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg. namun kurangnya pengawasan distribusi di lapangan menyebabkan hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ella Dewi Tri. (2018). *Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg*. Menemukan bahwa pengawasan di beberapa pangkalan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang belum optimal, dilihat dari penyimpangan pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET) dan tidak mencantumkan harga LPG 3 Kg pada papan blank usaha mereka. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menemukan di setiap tempat sub agen LPG terpasang peraturan terkait HET namun sub agen tetap menjual di atas HET. Serta banyaknya pengecer yang menjual tabung gas LPG 3 kg sehingga menjadi pertanyaan mendasar dalam penelitian ini bagaimana pengawasan yang dilakukan pada sub agen.

Penelitian lain terkait Gas LPG 3 KG juga dilakukan oleh Andini Faisal. (2015). *Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan perdagangan Kota Pekanbaru*. Hasil penelitian ditemukan banyak pelanggaran yaitu, pangkalan tidak hanya menjual LPG 3 Kg kepada sektor rumah tangga tertentu dan usaha mikro, pangkalan tidak menjual LPG 3 Kg sesuai HET, pangkalan menjual LPG 3 Kg lebih dari satu tabung untuk satu konsumen, pangkalan menjual LPG 3 Kg kepada pihak pengecer/toko/kios/kedai/ warung. Sedangkan dalam bidang pengawasan ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia, koordinasi, dan sarana prasarana. Sedangkan Peneliti dalam kasus penelitian ini, menemukan adanya pangkalan yang menjual gas LPG ke tempat lain, selain itu jadwal pengiriman gas LPG yang tidak menentu ditambah dengan sedikitnya waktu untuk membeli tabung gas LPG di tempat sub agen menjadi celah gas LPG dijual ke tempat lain demi keuntungan yang lebih banyak. Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah diMuara Haruskan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari. Dalam proses penyaluran gas LPG pada sub agen, biasanya akan dikawal oleh aparat kepolisian setempat guna mengurangi tindakan pemborongan gas LPG 3 kg oleh pihak-pihak tertentu. Saat pembelian gas LPG 3 kg pada sub agen, masyarakat

pengguna gas LPG 3 kg akan diminta fotocopy kartu Muara Harusrga untuk keperluan administrasi dan penjualan sesuai wilayah tertentu saja. Adapun skema sederhana pendistribusian gas LPG 3 kg seperti yang ada pada gambar di bawah ini:

Penjualan gas LPG 3 kg ditingkat sub agen dan pengecer seringkali memberlakukan harga yang berbeda-beda. Gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak hanya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah, namun digunakan juga masyarakat menengah ke atas. Masih banyaknya pembeli gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan aturan terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Berdasarkan pengamatan awal di Kecamatan Muara Harus sering terjadi masalah pada saat distribusi gas LPG 3 kg dari agen ke sub agen atau pangkalan seperti tingginya harga jual gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan HET yakni berkisar dari Rp.18.000,- sampai dengan Rp.30.000,- per tabung gas LPG 3 kg. sehingga sub agen lebih memilih menjual kepada seceran untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Selain itu penyaluran atau penjualan gas LPG 3 kg dilakukan hanya 2 kali dalam sebulan, sub agen lebih memilih menjual gas lpg 3 kg kepada sanak keluarganya terlebih dahulu terlepas dari pangkat atau jabatan keluragnya tersebut. waktu penyaluran atau penjualan gas LPG 3 kg dari sub agen ke masyarakat juga sangat singkat seringkali masyarakat yang datang terlambat tidak kebagian gas LPG 3 kg karena sub agen sudah tutup dan mereka terpaksa membeli pada pengecer yang tentu saja harganya jauh lebih tinggi dibandingkan membeli pada sub agen. Peneliti juga menemukan adanya diskriminasi penjualan oleh sub agen gas yang menjual gas LPG 3 kg hanya kepada orang-orang yang mengisi dan membeli air galon di tempat sub agen tersebut karena kebetulan sub agen tersebut juga melayani jasa pengisian air galon. Selain itu saat penelitian awal juga ditemui dalam 1 keluarga memiliki lebih dari 1 tabung gas LPG 3 KG.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat gas LPG 3 kg diperuntukkan masyarakat miskin namun kenyataannya dilapangan masih belum tepat sasaran. Padahal gas LPG 3 kg adalah hasil dari implementasi kebijakan pemerintah di dalam konversi minyak tanah ke gas, dan diberikan subsidi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat menengah ke bawah maka peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Implimentasi Gas LPG 3 kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong”. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong serta faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan tersebut.

LANDASAN TEORI

William N. Dunn mengatakan kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau para pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Tujuan dari kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan subsidi gas LPG 3 kg tentu bertujuan untuk memudahkan dan membantu mensejahterakan rakyat.

Tabung gas LPG 3 kg merupakan hasil implementasi dari kebijakan oleh karenanya perlu pengawasan dengan sebenarnya agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan sub agen tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan pihak agen. Dalam paradigma New Public Service (NPS) selain sebagai penerima hasil implementasi kebijakan, masyarakat juga berperan dalam menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan sebab masyarakat adalah warga negara yang mana memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasan.

Pendistribusian gas LPG merupakan adalah bentuk pelayanan publik pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta yakni Pertamina untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya manajemen dan pengawasan yang baik. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta akan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Menurut Denhardt & Denhardt Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. "*Citizens First*" harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997).

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kebijakan subsidi gas LPG 3 kg yang diperuntukkan masyarakat menengah kebawah masih belum tercapai sepenuhnya karena pengawasan di dalam implementasi kebijakannya tidak berjalan semestinya.

Implementasi kebijakan di lapangan harus terus diawasi apakah sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. S.P Siagian (2004:40) pengawasan berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

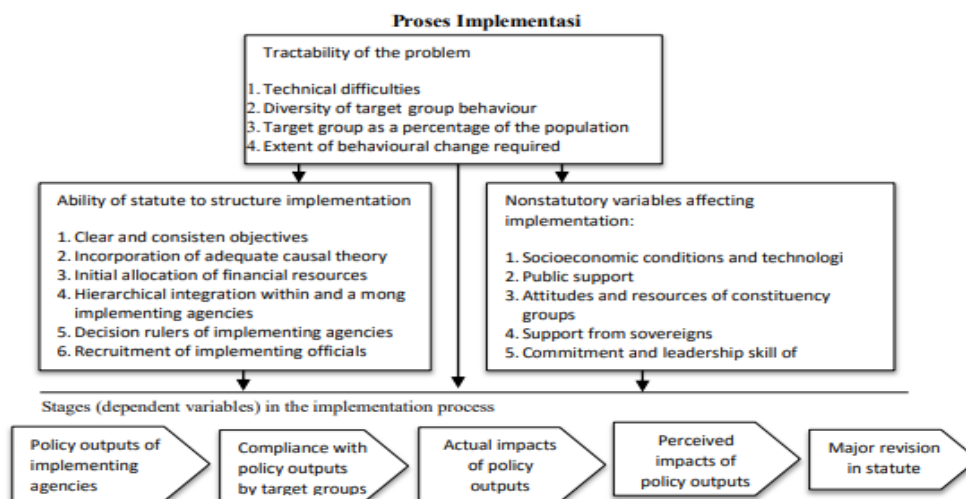
Mazmanian dan Sabatier (1979) mengembangkan model kontrol efektif dan pencapaian. Menurutnya, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis top-down dan bottom-up menjadi enam syarat yang dapat mencukupi dan harus ada agar implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan telah dinyatakan secara legal. Enam syarat dimaksudkan adalah:

- 1 Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi dan sumber daya.
- 2 Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu mengandung suatu teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- 3 Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihak-pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
- 4 Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- 5 Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislative dan eksekutif.
- 6 Perubahan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak dapat meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Sabatier (1986), memodifikasi model mereka pada tahun (1973), berdasarkan riset di Eropa dan Amerika. Mereka mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengidentifikasi tiga variabel bebas (independen variabel) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1 Mudah atau sulitnya mengendalikan masalah yang di hadapi, meliputi indikator:
 - a Keragaman perilaku kelompok sasaran,
 - b Kesukaran teknis
 - c Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
 - d presentase kelompok sasaran diban-dingkan dengan jumlah penduduk
- 2 Kemampuan dalam kebijakan untuk mensistematisasikan proses dalam implementasinya, dengan indikator:
 - a Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b Keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana
 - c Aturan keputusan dari badan pelaksana
 - d Ketepatan alokasi sumber daya
 - e Rekrutmen pejabat pelaksana
 - f Akses pihak luar secara formal.
- 3 Pengaruh langsung variabel politik/ kepentingan terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, meliputi indikator:
 - a Dukungan politik
 - b Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
 - c Dukungan dari pejabat atasan
 - d Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok
 - e Komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana

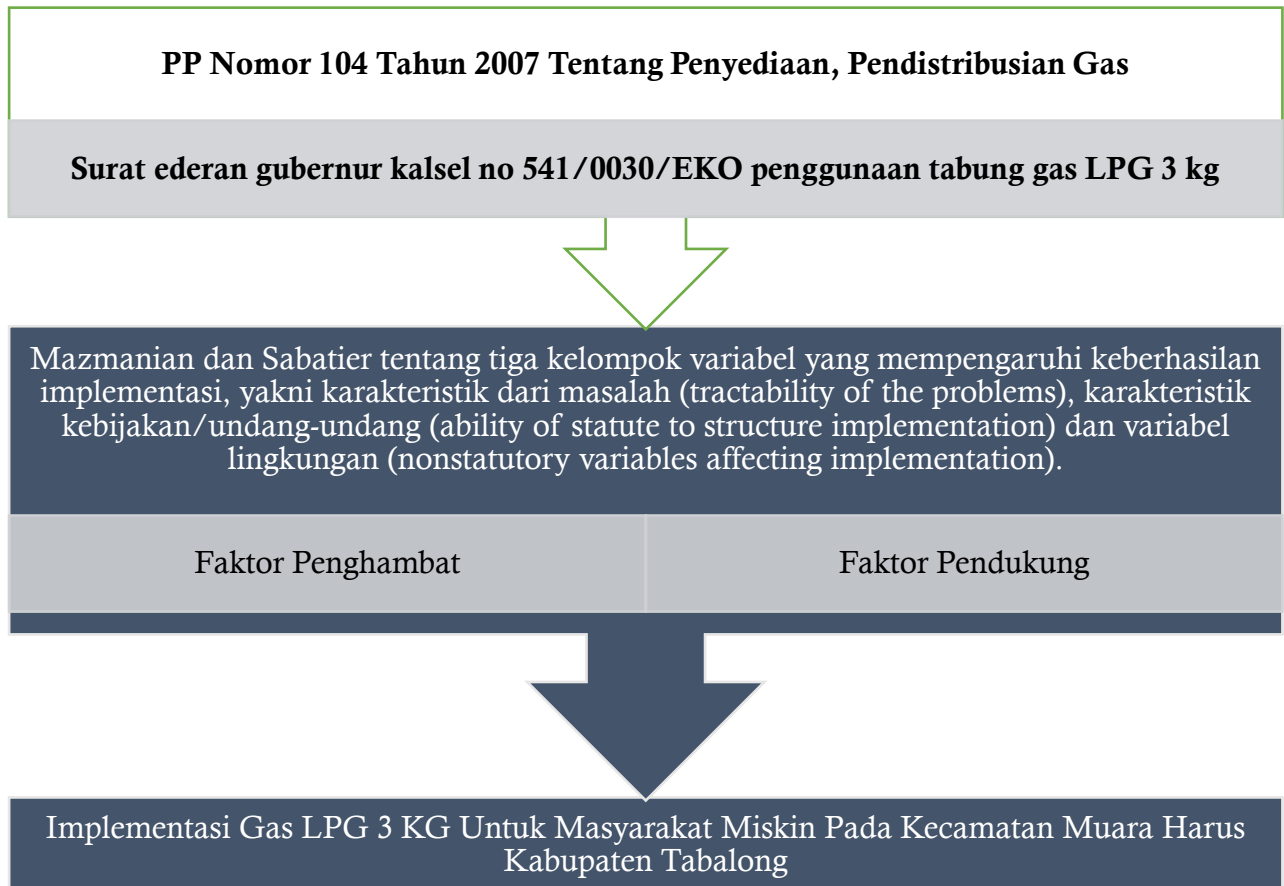
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011, 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).



Gambar 1 Proses Implementasi

Adapun frame work (kerangka pemikiran) pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian gas serta Surat ederan gubernur kalsel no 541/0030/EKO penggunaan tabung gas LPG 3 kg. Namun kenyataannya kondisi saat ini masih belum bisa diterapkan dengan maksimal, masih adanya masyarakat menengah ke atas membeli LPG 3 kg dan terdapat sub agen yang menjual gas LPG 3 kg ke tempat lain untuk ke untungan yang lebih besar serta adanya diskriminasi penjualan gas LPG. Untuk itu peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari Mazmanian dan Sabatier tentang tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Adapun faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah faktor sumber daya manusia, faktor kordinasi, dan faktor kesadaran masyarakat menjadi bagian penentu dalam mempengaruhi Indikator-indikator Implementasi yang disampaikan Mazmanian dan Sabatier untuk melihat sejauh mana implimentasi itu dapat berjalan dengan baik. dan Dari hal tersebut maka dapat diketahui bagaimana implimentasi LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dilaksanakn. Secara garis besar dapat penulis gambarkan dalam bentuk gambar 2 kerangka penelitian di bawah ini :



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada sub agen gas LPG yang ada di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Menggunakan Metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman. a) Pengumpulan Data, Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengumpulan berbagai dokumen yang mendukung dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menetapkan subyek dan informan yang akan diwawancarai yaitu dari Dinas Perindustrian dan Dagang (2 Orang), Sub Agen gas LPG 3 kg (5 Orang), Pedagang Eceran yang menjual gas LPG 3 kg (1 Orang), Masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 kg (5 Orang). b) Reduksi Data, Reduksi data dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian sampai akhir penelitian berlangsung hasil dari reduksi data ini berupa ringkasan dari catatan penelitian lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. c) Penyajian Data, Penyajian data ini untuk menemukan pola-pola yang memiliki makna serta dengan adanya penyajian data tersebut menghasilkan penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 2007: 84). d) Penarikan

Kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah kegiatan verifikasi selama penelitian sedang berlangsung hingga selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Gas LPG 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Disperindag, sub agen dan masyarakat, masalah dalam mengimplementasikan gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin cukup beragam. Ada beberapa sub agen yang menjual gas lpg lebih mengutamakan sanak keluarga dan orang terdekatnya. Terlepas dari jabatan atau pekerjaannya berhak atau tidaknya membeli gas lpg 3 kg. di beberapa wilayah ada juga sub agen yang menjual gas lpg 3 kg hanya kepada pelanggan air minum isi ulang miliknya.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)

Hasil wawancara dengan Disperindag, sub agen dan masyarakat, implementasi gas lpg 3 kg tidak terlaksana dengan baik karena pengawasan yang masih lemah, tidak ada hukuman ataupun sanksi untuk pembelian gas lpg 3 kg yang tidak sesuai. Masih banyaknya pengecer yang menjual gas lpg 3 kg menunjukkan bahwanya penjualan gas lpg 3 kg tidak berjalan dengan tepat sasaran. Padahal penyaluran gas lpg 3 kg hanya boleh melalui sub agen yang ada di desa-desa. Selain itu, tabung gas selain lpg 3 kg masih sulit didapatkan terutama di desa-desa kecil dan jauh dari kota. Selain itu tidak adanya data yang berhak dan tidak berhak membeli lpg 3 kg menjadikan semuanya tidak jelas dalam membeli.

3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Disperindag, sub agen dan masyarakat, pada Kecamatan Muara Harus, jarak desa yang berjauhan dengan desa lain juga menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan baik. Kurangnya informasi dari dunia luar. Selain itu jauhnya jarak desa dan akses yang sulit menyebabkan tidak ada pengawasan apapun terkait distribusi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin. Hal ini berdampak pada sub agen leluasa menjual gas lpg .

B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

1 Faktor Penghambat

a. Sumber daya manusia

Sub agen bisa diberikan izin untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg apabila di desa masih kekurangan gas LPG 3 kg. karena dalam 1 desa tidak memungkinkan adanya 2 atau lebih sub agen karena perlu tidaknya sub agen didirikan tergantung pada jumlah masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya sub agen di setiap wilayah berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya yang mengawasi sehingga menyebabkan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen tidak berjalan optimal. Menyebabkan implementasi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin masih tidak sesuai.

b. Rendahnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah

Koordinasi adalah bagian yang paling penting dalam kegiatan Implementasi. Antara pemerintah dan swasta tidak ada Kerjasama yang jelas. Sehingga menjadi celah dalam pendistribusian gas lpg untuk kepentingan pribadi. Padahal tabung gas lpg 3 kg di subsidi khusus untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, juga sering kali terjadi keterlambatan dalam pengiriman gas lpg 3 kg dari agen ke sub agen.

c. Kesadaran masyarakat

kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan tidak ada perbedaan atau rasa bersalah ketika menjual kepada asn atau masyarakat miskin. Masyarakat terbiasa dengan keadaan ini tanpa ada sosialisasi atau control dari pihak terkait. Tidak adanya sanksi yang diberikan menjadikan pembiasaan ini menjadi-jadi sehingga ada beberapa masyarakat yang membeli lebih dari 1 tabung gas.

2 Faktor Pendukung

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan implementasi gas lpg 3 Kg pada Kecamatan Muara Harus. Karena banyaknya pangkalan yang beroperasi maka dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan cekatan agar pengawasan dalam implementasi benar-benar berjalan. Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengawasan sampai saat ini masih terbatas untuk bisa mengawasi semua sub agen yang ada di Kecamatan Muara Harus.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah terkait saran atau kritikan dalam sebuah implementasi kebijakan. Koordinasi masyarakat dengan pemerintah dalam proses implementasi gas lpg 3 kg sangatlah penting karena pemerintah tidak akan bisa mengetahui implementasi berjalan atau tidaknya jika tidak ada masukan atau kritikan terkait kegiatan tersebut.

Implikasi Penelitian

A. Implementasi Gas LPG 3 Kg Untuk Masyarakat Miskin Pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data yang telah disajikan pada hasil penelitian dapat dianalisis dalam beberapa perspektif, dimana peneliti menggunakan teori Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011, 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Pengawasan dan Sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam implemntasi gas lpg 3 kg masih belum cukup dikarenakan banyaknya jumlah serta tempat yang harus diawasi. Karakteristik masyarakat Kecamatan Muara Harus masih pasif, karena lebih memilih diam dibandingkan berkoordinasi jika ada masalah terkait implementasi kebijakan gas lpg 3 kg. Hal tersebut terjadi karena sedikitnya jumlah sub

agen. Sehingga jika sub agen sampai tutup maka akan sulit untuk mendapatkan gas lpg 3 kg.

Masyarakat sangat berperan penting dalam implementasi sebab masyarakatlah yang merasakan kebijakan itu berlangsung di lapangan. Dan jika masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan tentu saja implemantasi tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, berdasarkan tahapan-tahapan pengawasan diperlukan keterlibatan para aktor yang terdiri dari Disperindag dan masyarakat. Peran keduanya haruslah aktif dan saling dukung satu sama lain. Jika semua aktor bekerja sama maka implementasi akan berjalan dengan maksimal dan efektif sehingga pendistribusian gas LPG 3 kg mencapai tujuan yang ada.

B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Gas LPG 3 Kg Pada kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

1. Faktor Penghambat

Sumber daya manusia merupakan satu faktor penting yang selalu ada dalam setiap kegiatan untuk membantu terwujudnya tujuan kegiatan termasuk implementasi kebijakan terkait distribusi gas LPG 3 kg. Kendala yang dihadapi dalam implimentasi gas lpg 3 kg adalah sumber daya manusia yang tidak memadai untuk bisa terus menerus ikut berpartisipasi mengawasi seluruh rangkaian implementasi pada sub agen yang ada. Sehingga kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala dalam implementasi distribusi gas lpg 3 kg karena sumber daya manusia yang terbatas tidak berbanding lurus dengan jumlah banyaknya sub agen gas LPG 3 kg yang harus diawasi.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam implementasi gas lpg 3 kg pada Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong adalah koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah. Koordinasi masyarakat dan Pemerintah yang dilakukan dalam pengawasan implementasi gas lpg 3 kg masih kurang sehingga terjadi beberapa “kenakalan-kenakalan” yang dilakukan oleh sub agen. Keterlibatan semua pihak dalam pengawasan ini sangat penting. Karena jika hanya Pemerintah melalui Disperindag saja yang bergerak untuk mengawasi, tentu masih ada celah-celah yang tidak bisa selalu diawasi jika masyarakat tidak memiliki pemahaman terkait distribusi gas LPG 3 kg.

Selain itu, dalam implementasi distribusi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin diharapkan mampu memahami kondisi yang terjadi pada saat kegiatan distribusi gas LPG 3 Kg itu dilakukan agar mereka bisa menilai dan mengambil tindakan atas apa yang mereka lihat dan pahami. Namun faktanya, masyarakat masih banyak diam ketika melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sub agen saat distribusi gas LPG 3 kg.

2. Faktor Pendukung

Apabila sumber daya manusia kurang maka pengawasan dalam implementasi akan kurang maksimal sebaliknya jika sumber daya manusia memadai maka proses implementasi akan berjalan lancar dan lebih efektif. Kendala yang dihadapi dalam proses implementas gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus ialah sumber daya manusia yang kurang. Sehingga

sumber daya manusia yang memadai akan mendukung keberhasilan implementasi terutama pengawasan distribusi gas LPG 3 kg.

Selain itu, koordinasi adalah hal yang penting dalam setiap kegiatan, tidak terkecuali dalam proses implementasi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus. Selama ini koordinasi Pemerintah melalui Disperindag dengan masyarakat masih sangat rendah. Sehingga implementasi khususnya dibidang pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Rendahnya koordinasi Pemerintah dengan masyarakat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah pemahaman tentang siapa saja yang berhak membeli gas LPG 3 kg dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait kecurangan dilapangan. Hal-hal tersebut perlu ditingkatkan, terutama kenyamanan masyarakat dalam berkoordinasi dengan Pemerintah melalui akses yang lebih mudah serta aman. Jika koordinasi Pemerintah dengan masyarakat bisa lebih nyaman dan aktif maka proses implementasi gas LPG 3 kg untuk masyarakat miskin pada Kecamatan Muara Harus akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran.

KESIMPULAN

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) pada Kecamatan Muara Harus dalam mengimplementasikan gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin cukup beragam. Ada beberapa sub agen yang menjual gas lpg lebih mengutamakan sanak keluarga dan orang terdekatnya. Terlepas dari jabatan atau pekerjaannya berhak atau tidaknya membeli gas lpg 3 kg. di beberapa wilayah ada juga sub agen yang menjual gas lpg 3 kg hanya kepada pelanggan air minum isi ulang miliknya.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dalam Implementasi gas lpg 3 kg tidak terlaksana dengan baik karena pengawasan yang masih lemah, tidak ada hukuman ataupun sanksi untuk pembelian gas lpg 3 kg yang tidak sesuai. Masih banyaknya pengecer yang menjual gas lpg 3 kg menunjukkan bahwanya penjualan gas lpg 3 kg tidak berjalan dengan tepat sasaran. Padahal penyaluran gas lpg 3 kg hanya boleh melalui sub agen yang ada di desa-desa. Selain itu, tabung gas selain lpg 3 kg masih sulit didapatkan terutama di desa-desa kecil dan jauh dari kota. Selain itu tidak adanya data yang berhak dan tidak berhak membeli lpg 3 kg menjadikan semuanya tidak jelas dalam membeli.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) berpengaruh pada Kecamatan Muara Harus memiliki banyak desa yang berjarak jauh dengan desa lain sehingga menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan baik. Kurangnya informasi dari dunia luar. Selain itu jauhnya jarak desa dan akses yang sulit menyebabkan tidak ada pengawasan apapun terkait distribusi gas lpg 3 kg untuk masyarakat miskin. Hal ini berdampak pada sub agen leluasa menjual gas lpg .
4. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 kg pada sub agen di Kecamatan Muara Harus ialah
Faktor penghambat :
 - Sumber daya manusia yang belum memadai,
 - Kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, dan

- Kesadaran masyarakat
- Faktor Pendukung :
- Sumber daya manusia yang memadai, dan
 - Koordinasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan bantuan lainnya kepada :

1. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos.,M.AP, CIQnR, Ketua Yayasan Bakti Muslimin;
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP, CIQaR, CIQnR, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai;
3. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.AP, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM);
4. Kepala Kantor kecamatan Muara Harus
5. Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Dagang kabupaten Tabalong
6. Keluarga dan teman saya yang telah memberikan dukungan;
7. Semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan jurnal ini hingga selesai dan teman-teman yang mendukung.

Penulis menerima segala masukan dan kritik dari semua pihak untuk kemajuan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agustino, Leo.2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- [2] Arbain, Taufik. (2018). Durian Runtuh, Mismanajemen dan Kuasa Sang Pambakal. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- [3] Badan Pusat Statistik Tabalong. 2018. Tabalong Dalam Angka 2018. Tanjung : BPS Kabupaten Tabalong.
- [4] Bungin, Burhan (ed.). 2001. Metode penelitian Kualitatif. Surabaya: Raja Grafindo Persada.
- [5] Gunawan, Imam. (2015).Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [6] Moleong, Lexy J, 1995. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,Bandung.
- [7] Nugroho, Riant (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [8] Sarman, Mukhtar. 2004. Pengantar Metode Penelitian Sosial. Banjarbaru: Pustaka FISIP UNLAM.
- [9] Barber, M., Kihn, P., & Moffit, A. 2011. Deliverology: From idea to implementation. McKinsey on Government
- [10] Faturrahman, M. 2016. “Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik”. *Tarbawi*, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2016.
- [11] Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*, Digital Book. Malang: Seribu Bintang
- [12] Mariyati, Tatik. 2013. “Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet”, *Buletin Pos dan Telekomunikasi* Vol.

- 11 No. 2, Juni 2013.
- [13] Ella Dewi Tri, 2019. Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas LPG Tabung 3 Kg. Padang: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 2019
- [14] Andini Faisal, Febri Yuliani, 2015. Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian Dan perdagangan Kota Pekanbaru. Riau: Jurnal Online Mahasiswa Vol 2 No.2 2015
- [15] Bayu Anggara, Syapril Abdullah. 2017. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Perindustrian Gas LPG 3 Kg Di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Publika Vol. 3 No. 2 2017
- [16] Triola Ramadhan, dkk. 2019. Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. Padang: Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 1 No. 1 2019
- [17] Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.